

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Rabu, 19 Desember 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Rabu, 19 Desember 2018	Konstruksi Serang-Panimbang Dipacu	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. memacu pembangunan jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 50,70 kilometer, yang menjadi bagian badan usaha, supaya rampung sesuai dengan target akhir 2019.
2	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Rabu, 19 Desember 2018	Berita Foto	Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur, di atas jalan tol Jakarta-Cikampek, di Bekasi, Jawa Barat, Senin.
3	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Rabu, 19 Desember 2018	Bendungan Logung Segera Diairi	Kementerian PUPR bersiap melakukan pengisian awal pada Bendungan Logung di Desa Tanjungrejo, Kudus, Jawa Tengah.
4	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Rabu, 19 Desember 2018	4 Provinsi dapat Hibah	Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp500 miliar pada tahun depan untuk hibah peningkatan kualitas jalan di empat provinsi.
5	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Rabu, 19 Desember 2018	Berita Foto	Dirjen SDA Kementerian PUPR Hari Suprayogi (kiri) bersama Bupati Kudus M. Tamzil melihat gambar pembangunan bendungan Logung saat pengisian awal (impounding) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa.
6	Media Indonesia (halaman 17)	Rabu, 19 Desember 2018	Masalah Pembangunan di Papua bukan soal Uang	Tanah Papua, wilayah Indonesia paling tmur, selalu menjadi perhatian nasional. Selain kekayaan alamnya yang berlimpah, Papua juga kerap muncul dalam perbincangan tentang ketertinggalan.
7	Bisnis Indonesia (halaman 3)	Rabu, 19 Desember 2018	Tol Trans-Jawa Tersambung	Sebanyak lima ruas tol siap dioperasikan untuk mendukung kelancaran lalu lintas menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2019.
8	Bisnis Indonesia (halaman 9)	Rabu, 19 Desember 2018	Sulsel Kebut 13 Proyek Infrastruktur Strategis	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimis ekonomi di wilayahnya akan melaju signifikan pada tahun depan sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia yang mematok pertumbuhan 7,4% - 7,6%.

Judul	Konstruksi Serang-Panimbang Dipacu	Tanggal	Rabu, 19 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. memacu pembangunan jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 50,70 kilometer, yang menjadi bagian badan usaha, supaya rampung sesuai dengan target akhir 2019.		

► JALAN TOL

Konstruksi Serang-Panimbang Dipacu

JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. memacu pembangunan jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 50,70 kilometer, yang menjadi bagian badan usaha, supaya rampung sesuai dengan target akhir 2019.

KOLABORASI BADAN USAHA DAN PEMERINTAH MEMBUKA AKSES KE TANJUNG LESUNG

Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang dikerjakan oleh badan usaha, yakni PT Wijaya Karya Serang Panimbang dan pemerintah dengan total 83,68 kilometer. Keberadaan jalan tol tersebut nantinya antara lain akan menjadi akses utama ke kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, Banten.

Rivki Maulana & Irene Agustine
rmaulana@bisnisid.com

Direktur Operasi 1 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKI) Agung Budi Waskito mengatakan bahwa penerapan fokus melakukan percepatan konstruksi untuk seksi 1 (Serang-Rangkas Bitung) sepanjang 26,50 km dan mempercepat pembebasan lahan seksi 3 (Bojong-Panimbang) sepanjang 24,40 km untuk mengoptimalkan target penyelesaian proyek pada akhir tahun depan.

Berdasarkan data pantauan Badan Pengatur Jalan Tol yang terbaru, progres pembebasan lahan seksi 1 sudah mencapai 95,06%, seksi 2 mencapai 95,72%, dan seksi 3 tercatat 47,41%.

Adapun, konstruksi pada seksi badan usaha jalan tol (BUJT) tengah dilakukan dengan progres saat ini sebesar 10,30% di segmen 1 dan 0% di segmen 3.

Agung mengakui bahwa masalah pembebasan lahan sempat menjadi salah satu hambatan, tetapi badan usaha melakukan percepatan di wilayah yang pembebasan lahannya sudah rampung.

"Berjalan terus. Yang lahannya sudah bebas kami kejar dan lakukan percepatan konstruksi," katanya kepada Bisnis, belum lama ini.

Koneksi proyek jalan tol Serang-Panimbang dengan nilai investasi Rp5,33 triliun dimiliki oleh PT Wijaya Karya

Serang Panimbang. WIKI menjadi pemegang saham terbesar pada pengusahaan tol ini dengan mennggung 80%, diikuti oleh PT Pembangunan Perumahan Tbk. (PTPP) 15%, dan PT Jababeka Infrastruktur 5%.

Pengerjaan proyek tersebut dilakukan dengan skema contractor pre-financing (CPF), yang dikerjakan oleh investor yang juga merupakan kontraktor, yakni WIKI dan PTPP.

Selain badan usaha, pemerintah juga ikut membangun proyek jalan tol Serang-Panimbang sebagai bagian dari dukungan infrastruktur atau *rehabilitate gap fund* (VGF) pada segmen 2 (Rangkasbitung-Bojong) sepanjang 33 km. Namun, sampai saat ini pembangunan belum dimulai.

VGF merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada proyek dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial proyek.

Dukungan berupa VGF dapat menurunkan biaya konstruksi suatu proyek sehingga tingkat pengembalian investasi semakin tinggi.

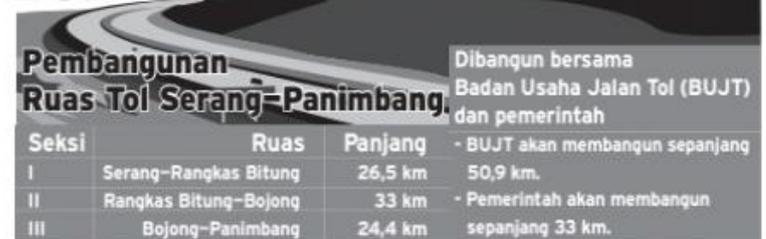
"Selesai kami targetkan tetap pada akhir 2019, untuk bagian WIKI," ujar Agung. Sebelumnya, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto menjelaskan bahwa progres kelanjutan tol Serang-Panimbang bagian pemerintah saat ini masih menunggu persetujuan pinjaman untuk mendanai proyek.

Pinjaman rencananya diajukan kepada China dengan estimasi kebutuhan VGF mencapai Rp3,50 triliun.

Saat ini, Sugiyartanto mengatakan bahwa surat pengajuan pinjaman sudah dikirimkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya diteruskan ke China.

"Surat sudah kami teruskan ke Bupenas. Jadi, ini menunggu persetujuan loan-nya dulu," kata Sugiyartanto kepada

Sumber: Kementerian PUPR, 2017
Bisnis/Intipage Adhira



Bisnis, belum lama ini.

TOL MANADO-BITUNG

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat memperkirakan jalan tol Manado-Bitung sepanjang 14 km bisa digunakan secara fungsional menjelang masa Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Kepala Balai Badan Pelaksana Jalan Nasional XV Sulawesi Utara & Gorontalo Triono Junoesmono mengatakan bahwa jalan tol yang bisa digunakan merupakan gabungan dari seksi yang dikerjakan oleh pemerintah dan badan usaha jalan tol (BUJT) PT Jasamarga Manado Bitung.

Progres fisik porsi jalan tol yang digarap oleh pemerintah sudah mendekati 80%. "Fungsional seperti ini sekitar 14 kilometer dengan menggunakan akses masuk dan keluar sementara," ujarnya kepada Bisnis, Senin (17/12).

Jalan tol yang bisa beroperasi secara fungsional terletak di segmen 1B dan 2A. Berdasarkan data pantauan Badan Pengatur Jalan Tol, segmen 1B memiliki panjang 7 km, menghubungkan Sukur dengan Tamaluntung.

Sementara itu, segmen 2A sepanjang 11,50 km menghubungkan Paslaten dengan Watudamba.

Secara keseluruhan, jalan tol Manado-Bitung memiliki panjang 39 km, menghubungkan ibu kota provinsi dengan kota pelabuhan di "ujung telunjuk" Pulau Sulawesi.

Pemerintah dan badan usaha berbagi peran dalam pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Kementerian PUPR membangun seksi 1 sepanjang 14 km, sedangkan PT Jasamarga Manado Bitung mendapatkan bagian membangun seksi 2 sepanjang 25 km.

Per 7 Desember 2018, progres konstruksi untuk keseluruhan mencapai 40,39%. Tol Manado-Bitung dijadwalkan beroperasi penuh pada 2019.

Bila telah beroperasi, jalan tol tersebut bakal memangkas waktu tempuh Manado ke Bitung dari semula 90 menit hingga 120 menit menjadi tinggal 45 menit.

Pada perkembangan lain, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda juga mengupayakan agar empat segmen sepanjang 79,35 km bisa beroperasi pada Maret 2019.

Pimpro PT Jasamarga Balikpapan

Samarinda Usodo mengatakan bahwa perusahaan masih mengalami kendala pembebasan lahan pada seksi 4.

Di samping itu, banyak ditemukan tanah lunak di sepanjang trase jalan tol. "Saat ini sedang berjalan upaya penanganan geoteknik dengan metode yang optimal, khususnya seksi 4A," katanya ketika dihubungi secara terpisah.

Secara keseluruhan, pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda terbagi ke dalam lima seksi.

Seksi 1 didanai anggaran daerah sepanjang 20,33 km dan progresnya telah mencapai 95,7%, sedangkan seksi 5 yang dibiayai melalui anggaran negara dan pinjaman luar negeri sepanjang 11 km telah mencapai progres 66,1%.

Adapun, seksi 2, seksi 3, dan seksi 4 digarap oleh PT Jasamarga Samarinda Balikpapan. Progres tiap-tiap seksi sebesar 75,50%, 91,60%, dan 67,60%.

Saat beroperasi, jalan tol pertama di Kalimantan itu akan membuat waktu tempuh menjadi 1 jam. Sebelumnya, Balikpapan-Samarinda yang berjarak 150 km ditempuh dalam waktu 3 jam hingga 4 jam. ■

► Selain badan usaha, pemerintah juga ikut membangun proyek jalan tol Serang-Panimbang sebagai bagian dari dukungan infrastruktur.

► Jalan tol Manado-Bitung sepanjang 14 kilometer bisa digunakan secara fungsional menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 19 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur, di atas jalan tol Jakarta-Cikampek, di Bekasi, Jawa Barat, Senin.		

► **DIHENTIKAN SEMENTARA**



Antara/Risky Andrianto

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur, di atas jalan tol Jakarta—Cikampek, di Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/12). Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan melakukan penghentian sementara proyek pembangunan konstruksi kereta ringan (*light rail transit/*

LRT), jalan tol layang Jakarta—Cikampek II, kereta cepat, lintas atas, dan rehabilitasi di sepanjang jalan tol Jakarta—Cikampek pada 18 Desember hingga 1 Januari 2019 guna menghindari kemacetan saat libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Judul	Bendungan Logung Segera Diairi	Tanggal	Rabu, 19 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Kementerian PUPR bersiap melakukan pengisian awal pada Bendungan Logung di Desa Tanjungrejo, Kudus, Jawa Tengah.		

► SUMBER DAYA AIR

Bendungan Logung Segera Diairi

KUDUS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersiap melakukan pengisian awal pada Bendungan Logung di Desa Tanjungrejo, Kudus, Jawa Tengah.

"Bendungan Logung merupakan salah satu dari 65 bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk mendukung program Nawacita Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ketahanan pangan dan air nasional," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi, Selasa (18/12).

Pembangunan Bendungan Logung membutuhkan waktu sekitar 5 tahun yang dimulai sejak 2014 dengan jangka waktu pelaksanaan 1.460 hari kalender hingga 2018.

Nilai kontrak proyek yang dibangun oleh kerja sama operasional antara PT Wijaya Karya Tbk. & PT Nindya Karya itu adalah Rp620 miliar.

Bendungan ini memiliki tinggi 55 meter dan panjang

350 meter, serta mampu menampung air sebanyak 20,15 juta meter kubik dengan volume efektif sebesar 13,72 juta meter kubik.

Bendungan Logung direncanakan dapat memenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan potensial maksimal 5.296 hektare yang terdiri atas luas irigasi yang ada 2.805 hektare, serta irigasi pengembangan 2.491 hektare di wilayah Kabupaten Kudus, serta peningkatan produktivitas tanaman padi.

Selain itu, bendungan tersebut juga mampu memenuhi kebutuhan air baku sebanyak 200 liter per detik di perkotaan dan perdesaan di Kudus, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik tenaga mikro-hidro sebesar 0,50 megawatt.

Kabupaten Kudus memiliki masyarakat yang hidup dari pertanian dan industri yang sangat membutuhkan air untuk keperluan pertanian maupun air baku untuk air minum.

Sementara itu, pada saat

musim kemarau kabupaten tersebut sering mengalami kekeringan dan saat musim hujan mengalami banjir akibat meluapnya sungai di pegunungan Muria.

Adanya bendungan yang terletak di lereng Gunung Muria itu diharapkan dapat mengurangi bencana banjir wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya.

Selain itu, Bendungan Logung juga memiliki manfaat sebagai sarana wisata yang merupakan bentuk ekonomi kerakyatan tersendiri.

KONSERVASI

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno mengatakan bahwa pariwisata di Bendungan Logung nantinya harus tetap memperhatikan prinsip hidrologi dan konservasi dari hulu ke hilir.

"Panorama yang tersaji di sekeliling bendungan membuatnya memiliki keistimewaan di-

bandingkan dengan bendungan lain adalah panorama Gunung Muria menjadi daya tarik tersendiri," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa saat ini dari 7,30 juta hektare lahan irigasi, hanya sekitar 11% yang mendapatkan pasokan air dari bendungan. Nantinya, setelah 65 bendungan rampung, daerah irigasi yang akan dipasok airnya dari bendungan akan bertambah menjadi 19—20%.

Pada tahun ini, telah diresmikan pengoperasian Bendungan Tanju di Dompur, NTB.

Kementerian PUPR juga menargetkan lima bendungan lainnya yang akan selesai secara bertahap pada akhir 2018 yakni Bendungan Rotiklot di NTT, Mila di NTB, Gondang di Jateng, Sei Gong di Kepri, dan Sindang Heula di Banten.

Selanjutnya, pada awal 2019 konstruksi Bendungan Passaloring di Sulsel, serta Kuningan di Jabar ditargetkan selesai dikerjakan. (Antara)

Judul	4 Provinsi dapat Hibah	Tanggal	Rabu, 19 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp500 miliar pada tahun depan untuk hibah peningkatan kualitas jalan di empat provinsi.		

► PENINGKATAN MUTU JALAN

4 Provinsi Dapat Hibah

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran Rp500 miliar pada tahun depan untuk hibah peningkatan kualitas jalan di empat provinsi.

Dalam 5 tahun, hibah ini diproyeksi mencakup 15 provinsi dengan usulan anggaran Rp15 triliun.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan & Fasilitas Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan bahwa dana hibah diharapkan bisa membantu tata kelola dan kualitas pemeliharaan jaringan jalan di daerah.

Tahun depan, dana hibah akan diberikan kepada empat pemerintah provinsi, yaitu Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Hibah diberikan kepada empat provinsi tersebut untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional di tiap-tiap provinsi.

Dalam program hibah jalan daerah (PHJD), pemerintah daerah akan membiayai terlebih dahulu kegiatan fisik dan nonfisik. Selanjutnya, hibah baru akan diberikan bila calon penerima telah memenuhi standar kualitas yang ditentukan.

Hedy mengemukakan bahwa pihaknya bakal terus mendampingi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan.

"Target [panjang jalan] yang ditangani dalam program PHJD tahun 2019

mencapai 780,86 kilometer," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (18/12).

Menurut Hedy, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola jalan di daerahnya diharapkan bisa meningkatkan nilai guna dari jaringan jalan yang ada. Pasalnya, kualitas jalan yang baik bakal merangsang kegiatan ekonomi dan investasi baru di daerah.

PHJD merupakan pengembangan dari proyek rintisan bernama Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM). Dalam proyek itu, Kementerian PUPR mendapat bantuan dari Pemerintah Australia melalui kerangka Kemitraan Indonesia—Australia untuk Infrastruktur.

PRIM digelar sejak 2013 di Nusa Tenggara Barat. Selama 5 tahun masa pelaksanaan, panjang jalan yang ditangani mencapai 4.565 km.

Selama periode tersebut, kualitas jalan juga meningkat. Tingkat kemantapan jalan naik dari posisi 70% pada 2014 menjadi 85% pada 2018.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menambahkan bahwa realisasi penggunaan dana dalam program PRIM mencapai 95%.

Dia berharap supaya penerima hibah bisa memanfaatkan dan mengelola hibah secara tepat.

"Program ini merupakan program *specific grant* yang nantinya dapat dikembangkan kepada program lain seperti DAK [dana alokasi khusus]."

(Rivki Maulana)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 19 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Dirjen SDA Kementerian PUPR Hari Suprayogi (kiri) bersama Bupati Kudus M. Tamzil melihat gambar pembangunan bendungan Logung saat pengisian awal (impounding) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa.		

► BENDUNGAN LOGUNG



Antara/Yusuf Nugroho

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi (*kiri*) bersama Bupati Kudus M. Tamzil melihat gambar pembangunan bendungan Logung saat pengisian awal (*impounding*) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (18/12). Bendungan Logung merupakan salah satu dari 65 bendungan yang dibangun Kementerian PUPR untuk mendukung program Nawacita Presiden Joko Widodo demi mewujudkan ketahanan pangan dan air nasional.

Judul	Masalah Pembangunan di Papua bukan soal Uang	Tanggal	Rabu, 19 Desember 2018
Media	Media Indonesia (halaman 17)		
Resume	Tanah Papua, wilayah Indonesia paling timur, selalu menjadi perhatian nasional. Selain kekayaan alamnya yang berlimpah, Papua juga kerap muncul dalam perbincangan tentang ketertinggalan.		

Masalah Pembangunan di Papua bukan soal Uang

TANAH Papua, wilayah Indonesia paling timur, selalu menjadi perhatian nasional. Selain kekayaan alamnya yang berlimpah, Papua juga kerap muncul dalam perbincangan tentang ketertinggalan.

Padahal, sejak 17 tahun silam, telah lahir UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang menjadi babak baru hubungan antara Jakarta dan Papua.

"Kebijakan negara perihal desain otsus bagi Papua ialah model baru hubungan pusat-daerah di Indonesia dalam menjawab setumpuk

persoalan yang melilit Papua sekian dekade. Pilihan otonomi khusus oleh negara ialah sebuah pilihan realitis. Arsitektur otonomi khusus telah kita sepakati sejak 2001. Apalagi pilihan ini semakin diperkuat dengan UUD 1945 amandemen 4 di tahun 2002 yang mengakui kekhususan," tutur Velix V Wanggai, Sekretaris Desk Papua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Jakarta, kemarin.

Kenyataannya dalam kurun 17 tahun, penerapan otsus Papua belum lah maksimal. Aspek krusial yang

terjadi, tutur Velix, ialah persepsi yang berbeda di dalam memaknai otonomi khusus, aspek kekhususan daerah, kearifan lokal Papua, dan nilai historis Papua. Persepsi yang berbeda di berbagai policy actors dan masyarakat sipil telah menyebabkan apa yang tertera dalam UU No 21/2001 belum terlaksana secara murni dan konsekuen.

Salah satu perbedaan persepsi yang sering kali muncul di permukaan ialah soal dana otsus. Di satu sisi, ada pandangan yang menganggap kewenangan dan dana otonomi



Velix Wanggai
Sekretaris Desk Papua Bappenas

khusus telah besar dialokasikan ke Papua. Namun, ternyata itu belum memberikan makna bagi perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan orang asli Papua.

"Di sisi lain, ada yang menganggap jumlah dana otonomi khusus masih

kecil tidak sebanding dengan tingkat kesulitan wilayah dan kemahadan harga di berbagai pelosok tanah Papua," tegasnya.

Oktorialdi, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, selaku Ketua Tim Pelaksana Desk Papua, menuturkan tantangan pemerintah ialah bagaimana meningkatkan pembangunan manusia di Papua. "Di Papua itu akan berbeda, mana yang sudah di kota, mana yang masih berburu, ini akan berbeda pendekatannya," tuturnya.

Masalah yang tidak kalah penting ialah konflik lahan, klaim dan reklamasi tanah. "Ini menjadi sangat mengganggu sekali," katanya.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Papua pada 2020 diperkirakan mencapai 6% dan melesat menjadi 7,8% pada 2024. Alokasi dana transfer APBN ke wilayah Papua sejak otsus

meningkat signifikan mencapai Rp44,8 triliun (Papua) dan Rp15,4 triliun (Papua Barat).

Sementara itu, total anggaran Kementerian/Lembaga pada 2016 tercatat Rp15,9 triliun, yang terbagi untuk Papua Rp10,44 triliun dan Papua Barat Rp5,46 triliun. "Jadi, masalah pembangunan Papua bukan masalah uang," tandas Oktorialdi.

Di samping dana otsus, masih ada dana lainnya, yaitu DBH, DAU, DAK, DTL ataupun pajak.

Freddy Numberi, tokoh Papua dan mantan menteri perhubungan, mengatakan Papua memiliki dimensi yang berbeda dari permasalahan pembangunan di wilayah lain Indonesia. Untuk itu, diperlukan aspek lain yang mencakup pembentukan dan pengembangan keseluruhan sikap sosial-budaya dalam masyarakat adat di Papua. (Uud/E-3)

Judul	Tol Trans-Jawa Tersambung	Tanggal	Rabu, 19 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 3)		
Resume	Sebanyak lima ruas tol siap dioperasikan untuk mendukung kelancaran lalu lintas menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2019.		

▶ LALU LINTAS JELANG TAHUN BARU

Tol Trans-Jawa Tersambung

JAKARTA — Sebanyak lima ruas tol siap dioperasikan untuk mendukung kelancaran lalu lintas menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2019.

Iham Budhiman & Irene Agustine
redaksi@bisnis.com

Pengoperasian jalan tol tersebut rencananya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, pada libur panjang tersebut, tol Trans-Jawa sudah tersambung mulai dari Merak hingga Pasuruan dengan panjang sekitar 900 km.

Direktur Operasi II JSMR Subakti Syukur mengatakan peresmian jalan tol tersebut dijadwalkan Kamis, 20 Desember, sehingga pengguna jalan dapat memanfaatkannya selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tanpa terputus.

Kelima ruas tol yang akan melengkapi tersambungannya jaringan tol Trans-Jawa pada tahun ini yakni Pemalang—Batang 33,2 km, Batang—Semarang 75 km, Semarang—Solo segmen Salatiga—Kertastura 32,54 km, Ngawi—Kertosono segmen Wilangan—Kertosono sepanjang 37 km, dan Gempol—Pasuruan segmen Pasuruan—Grati sepanjang 13,6 km.

Empat ruas terakhir merupakan tol yang dikelola Jasa Marga, sedangkan Pemalang—Batang dioperasikan oleh unit usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Setelah diresmikan [presiden] akan kami buka untuk bisa dilewati pada malamnya," ujar Subakti dalam konferensi pers Rencana Operasi Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019, Selasa (18/12).

Dia memastikan operasional lima ruas tol tersebut masih gratis sembari menunggu surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang penetapan tarif tol. Adapun, pengoperasian tol tersebut nantinya sudah memenuhi kaidah laik operasi dengan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dari pemerintah.

Selain itu dua ruas tol diluar Trans-Jawa, yakni Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi segmen Sei Rampah—Tebing Tinggi sepanjang 7,65 km dan Manado—Bitung segmen Sukur—Danuwu-

du (16 km) juga akan bisa dilewati fungsional oleh pengguna jalan pada Nataru tahun ini.

Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada infrastruktur Trans-Jawa yang sudah tersambung, Subakti mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya, menghentikan pengerjaan proyek Jakarta—Cikampek II Elevated sepanjang 39 km selama 8 hari sesuai arahan Kementerian PUPR.

Di jalur tol existing Jakarta—Cikampek (Japek) sepanjang 73 km saat ini banyak proyek infrastruktur yang dikerjakan, sehingga membuat kemacetan parah,



Bisnis/Rediyo Dua

antara lain Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta—Bandung.

Penghentian pengerjaan akan dilakukan pada perkiraan arus mudik Natal 19—22 Desember dan pada arus balik Natal 25 Desember. Setelahnya, penghentian pengerjaan dilanjutkan pada perkiraan arus mudik Tahun Baru pada 28—29 Desember dan arus Balik Tahun Baru 1 Januari 2019.

"Di luar tanggal tersebut proyek Japek II Elevated masih mengejar target penyelesaian sesuai rencana, yakni Mei atau sebelum Lebaran bisa fungsional," ujar Subakti.

Jasa Marga juga siap menambah jumlah gardu operasi, optimalisasi pelayanan lalu lintas dan pelayanan di area peristirahatan. Penambahan gardu operasi salah satunya dilakukan di Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama,

yang diperkirakan terjadi penambahan volume kendaraan sebanyak 33% atau 85.000 kendaraan dibandingkan dengan kondisi normal. Sebanyak 20 gardu masuk dan 27 gardu keluar siap dioperasikan untuk memudahkan pengguna jalan bertransaksi.

Untuk arus mudik Tahun Baru diperkirakan terjadi pada H-4 (28/12) dengan estimasi 88.000 kendaraan atau naik 27% dari kondisi normal.

Sementara itu, puncak arus balik Natal diperkirakan terjadi pada 25 Desember dengan volume kendaraan yang melintas di GT Cikarang Utama mencapai 92.000 unit atau naik 62,7% dari kondisi normal. Adapun, puncak arus balik Tahun Baru akan terjadi pada 1 Januari dengan estimasi 95.000 kendaraan yang melintas atau naik 68% dari kondisi normal.

Antipasi lainnya dilakukan dengan memanfaatkan 171 unit *mobile reader* di beberapa tol yang dikelola perseoran.

Dari sisi optimalisasi pelayanan lalu lintas, Jasa Marga bersinergi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengatur waktu operasi angkutan barang. Optimalisasi kapasitas lajur (*contra/low*) dilakukan pula, termasuk distribusi beban lalu lintas.

Adapun di area peristirahatan, sedikitnya 57 lokasi akan ditingkatkan pelayanannya. Tidak ketinggalan pula penambahan SPBU bergerak dan penyediaan BBM kemasan, poliklinik gratis, penambahan toilet bergerak dan optimalisasi pelayanan lainnya.

Dalam perkembangan lainnya, masih banyak dijumpai bus reguler dan pariwisata yang tidak lolos *ramp check* (pemeriksaan acak) menjelang libur Nataru.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, bus wisata dan reguler yang telah diperiksa sebanyak 27.332 dari total 49.000 bus yang ada di Indonesia. Namun, bila dilihat sesuai regulasi, bus yang laik jalan per Selasa, 18 Desember sebanyak 21.228 unit atau 65%.

Bus yang tidak lolos tersebut sebanyak 6.092 unit dan diminta untuk diperbaiki sampai 20 Desember untuk kemudian diperiksa ulang. Sebagian besar bus yang tidak lulus cek acak berada di Pulau Jawa dan Sumatra. ☐

Judul	Sulsel Kebut 13 Proyek Infrastruktur Strategis	Tanggal	Rabu, 19 Desember 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 9)		
Resume	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimis ekonomi di wilayahnya akan melaju signifikan pada tahun depan sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia yang mematok pertumbuhan 7,4% - 7,6%.		

► PERTUMBUHAN EKONOMI 2019

Sulsel Kebut 13 Proyek Infrastruktur Strategis

MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimistis ekonomi di wilayahnya akan melaju signifikan pada tahun depan sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia yang mematok pertumbuhan 7,4%—7,6%.

redaksi@bisnis.com

Adapun, untuk memacu pertumbuhan itu, Pemprov Sulsel menyatakan siap merealisasikan 13 proyek strategis pada 2019. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk merealisasikan proyek itu mencapai Rp1 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman memerinci, sejumlah proyek tersebut merupakan proyek prioritas untuk menghadirkan sumber ekonomi baru dan menunjang infrastruktur yang sudah ada di Sulsel.

"Pada 2019 nanti fokus pembangunan akan ditujukan untuk proyek *bypass* Mamminasata, pembangunan jalan untuk daerah terisolir, serta proyek empat bendungan seperti bendungan Pamukkulu di Takalar, bendungan Karalloe di Gowa, dan bendungan Passeloreng di Wajo," ungkap Jufri, Senin (17/12).

Selain itu, ada juga proyek revitalisasi Danau Tempe, proyek transportasi untuk Bandara Buntu Kunik dan Bandara Bua serta perampungan proyek kereta api Trans Sulawesi.

Sementara itu, sumber ekonomi baru yang menjadi rancangan Pemprov Sulsel yaitu melalui pengembangan sektor pariwisata dan pelayanan jasa kesehatan.

Di sektor pariwisata, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, bakal membangun 10 *rest area* di beberapa titik.

"Kemudian ada sektor kesehatan, pada 2019 akan ada dua rumah sakit regional yang akan dibangun di Kabupaten Bone dan Kota Palopo," sebut Jufri.

Dia menerangkan, pihaknya akan melakukan pemetaan, utamanya dalam hal ketersediaan lahan. Menurutnya, kesiapan lahan bebas sengketa akan mempermudah pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Di seluruh proyek pembangunan itu, salah satu hal yang bisa menunjang aktivitas perekonomian yaitu adanya penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut diklaim bisa

► **Penyerapan anggaran diharapkan bisa memacu daya beli masyarakat.**

► **Pertumbuhan ekonomi Sulsel 3 tahun terakhir selalu di atas 7%.**

mengurangi angka pengangguran di Sulsel.

"Ada juga penyerapan anggaran sehingga bisa memacu daya beli masyarakat," tambah Jufri.

Sektor infrastruktur memang menjadi tumpuan utama Pemprov Sulsel untuk memacu pertumbuhan ekonomi pada 2019. Namun, ini bukan berarti sektor lain tak menjadi fokus perhatian pemerintah.

Sektor lain seperti agribisnis, industri pengolahan, dan perdagangan akan didorong guna mempertahankan Sulsel tetap berada di tiga besar pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Pertumbuhan ekonomi Sulsel selama 3 tahun terakhir selalu menduduki posisi di atas 7%.

Pencapaian ini dinilai sebagai prestasi yang mesti dipertahankan oleh Pemprov Sulsel dengan dukungan seluruh pihak terkait.

Pertumbuhan ekonomi selama 2018 meningkat hingga pada kuartal III mencapai 7,17 persen. Bank Indonesia (BI) Sulsel mencatat pertumbuhan didorong karena tingginya pertumbuhan lapangan usaha konstruksi.

TUMBUH POSITIF

Sementara itu, Kepala BI Sulsel Bambang Kusmiarsno, menyatakan kondisi perekonomian Sulsel yang diprediksi pada 2019 di angka 7,4%—7,6% akan didukung dengan positifnya pertumbuhan ekonomi Sulsel pada kuartal III 2018, yakni 7,17% per tahun atau *year-on-year* (yoy).

"Sulsel terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yang ditunjukkan dengan pangsa terhadap ekonomi nasional yang juga cenderung meningkat," ungkap Bambang.

Dia memperkirakan, sejumlah hal yang akan mendorong pertumbuhan itu salah satunya adalah berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur.

Infrastruktur bendungan misalnya, sebanyak empat proyek bendungan pada 2019 yang akan beroperasi, diperkirakan dapat meningkatkan produksi tanaman pangan.

"Meski begitu, pemerintah harus tetap waspada dengan sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, perang dagang yang masih terjadi antara Amerika dan China," jelasnya.

Hal lain yang turut mendukung optimisme Pemprov Sulsel yaitu berlanjutnya investasi infrastruktur. Pasalnya, sektor itu akan mendorong lapangan usaha konstruksi termasuk mendorong komitmen yang kuat di sektor pariwisata.

"Komitmen Pemprov Sulsel mengembangkan sektor ini akan meningkatkan pertumbuhan perdagangan serta akomodasi dan makan minum," ungkapnya.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Yusran IB Herald optimistis dengan target yang ditetapkan Pemprov Sulsel.

Berdasarkan pandangan Apindo, pencapaian pertumbuhan itu sangat mungkin terjadi. Apalagi pemerintah juga tengah membuka jalan untuk sejumlah sektor lain termasuk dalam memberikan kepastian hukum bagi investor agar lebih mudah berinvestasi di Sulsel.

"Pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan sektor lainnya sudah pasti akan menyerap banyak lapangan kerja sehingga roda perekonomian di masyarakat akan bergerak, muaranya daya beli masyarakat juga akan meningkat," terang Yusran.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Muhammadiyah Makassar, Abdul Muthalib mengatakan, untuk mewujudkan proyeksi dan target pemerintah dengan angka hingga 7,6% sebaiknya Pemprov Sulsel lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Menurutnya, sebagian besar dari 13 proyek infrastruktur yang akan digenot merupakan proyek strategis nasional. "Kita tentu akan tetap mengacu dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika ekonomi nasional sudah mampu menembus 5,5% saya rasa itu tidak masalah. Infrastruktur di Sulsel itu terkait kondisi investasi secara nasional," ungkap Muthalib. (036) 